

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good corporate governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkap (disclosure) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 2004).

Corporate governance telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa tahun belakangan ini. Masalah *corporate governance* semakin mendapat perhatian besar di Asia sejak terjadinya krisis finansial di berbagai Negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *good corporate governance* (GCG) di Negara- Negara Asia. Kajian mengenai *corporate governance* mulai meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron. Sebelum tahun 2002 Enron adalah perusahaan dengan pertumbuhan finansial yang pesat. skandal ini mulai terungkap ketika pada awal 2002 perhitungan atas total revenue Enron di tahun 2000 yang sebelumnya berjumlah 100,8 milyar USD menjadi hanya sembilan milyar USD. Skandal finansial “megador” yang disebabkan adanya *misleading* financial statement membawa dampak yang luar biasa antara lain: Enron pailit, kurang kepercayaan atas informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di enron (Arifin, 2005).

Beberapa kasus juga terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi. (Boediono, 2005).

Dengan melihat kasus tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* masih sangat lemah, karena praktik menipulasi laporan keuangan masih tetap dilakukan walaupun sudah menjauhi krisis yaitu tahun 1997-1998. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi dalam pembuatan keputusan dan tindakan perusahaan (Alijoyo et al., 2004).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka tetapi juga sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 2004).

Penerapan *corporate governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *corporate governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Untuk itu penerapan *corporate governance* di Indonesia sangat penting, karena prinsip *corporate governance* dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia tidak tertinggal dan dapat bersaing secara global.

Dengan adanya sistem *corporate governance* para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh return atas investasinya, karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. *Corporate Governance* juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di kantor korporat. Dalam hal ini *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. (FCGI, 2003).

Dengan melihat keadaan tersebut sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang aktifitas penerapan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan tata pengelolaan perusahaan yang menguraikan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan perusahaan. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak.

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati dan Rika, 2004).

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *corporate governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan, mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing - masing dalam proses penyusunan tersebut.

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*neture of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara, 2003 dalam Supriyatno 2006). Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance*. Terlebih lagi setelah beberapa Negara Asia terkena krisis finansial. (Arum dan Turner, 2003 dalam Supriyatno 2006). Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam penerapan *corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian Negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998 (Husan, 2001). *Corporate governance* pada industri perbankan di Negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi. Khususnya sebagai mesin ekonomi (King dan Levine, 1993 dalam Sam'ani, 2008). Kedua, di Negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik memiliki kelulusan yang lebih besar dalam menjalankan operasi abnk. (Arum, Turner, 2003 dalam Supriyatno 2006).

Menurut pendapat Caprio dan Levine (2002), sebagaimana telah dikutip Sam'ani(2008), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor saham yang tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru akan menghambat mekanisme *corporate governance*. Masalah keagenan dalam sektor keuangan pada hakikatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat hutang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*).

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, *Presiden of the World bank*, c. (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sedangkan, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship* model. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Dengan demikian “*manager could not trusted to do their job which of cours is to maximize shreholder value*”.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), dijelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*prinsipal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ini dapat menimbulkan konflik yang disebut *agency conflict*. Hal ini disebabkan pihak prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang saling bertentangan (Jensen dan Meckling, 1976). Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto dkk, 2000).

Manajer perusahaan yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas pemilik. Dengan informasi yang dimiliki manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan yang kepada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. (Ujianto dan Pramuka, 2007). Richardson (dalam Ujianto dan Pramuka, 2007) menerangkan bahwa kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri antar manajemen (*agen*) dan pemilik (*prinsipal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*). (Richardson, 1998).

Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang diinginkan oleh pemilik. (Menurut Dechow dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006), manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan keuangan yang dibuatnya sendiri. Hal ini diprediksi dapat menimbulkan manipulasi laba yang sering diartikan sebagai manajemen laba.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd, *et al.* (1998) dalam Midiastuti dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikan yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, memlaui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Decow, *et al.* (1996) dan Beasly (1996) dalam Sam'ani (2008) menemukan hubungan yang signifikan antara para dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam monitor proses pelaporan keuangan. Nama besar, kemauan dan iktikad baik saja belum cukup untuk membangun dewan komisaris berkelas dunia, dibutuhkan struktu, sistem dan proses yang memadai. Dewan komisaris harus berperan aktif, independen dan konstruktif. (Alijoyo, *et al.* 2004).

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah *corporate governance*. Sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 isu mengenai *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasa penting dan menarik (Suhardjanto dan Apreria, 2010). Penelitian mengenai hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja telah banyak dilakukan. Penelitian CLSA (*Credit Lyonnais Securities Asset*) tahun 2002 menemukan bahwa saham perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik menunjukkan kinerja yang bagus. Demikian juga survei yang dilakukan oleh Mc Kinsey

(2001) menemukan investor bersedia memberi premium 10-12% kepada perusahaan yang menerapkan *corporate governance* secara konsisten (Isgiyarta dan Tristiarini 2005).

Berghe dan Ridder (1999) dalam penelitian sebelumnya, menghubungkan kinerja perusahaan dengan good corporate governance tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Daily dkk, (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati, dkk (2004). Demikian juga dengan Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor performance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers, dkk (2003) dalam Darmawati (2004) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Menurut Kakabadse dkk, (2001) dalam Darmawati (2004) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) perspektif teoritis yang diterapkan, 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Hastuti (2005) juga melakukan penelitian tentang GCG dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan. Dengan menggunakan data perusahaan yang sahamnya termasuk LQ45 tahun 2001-2002, hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Tobins'Q. Penelitian Kusumawati dan

Riyanto (2005) yang menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2002 berhasil membuktikan penerapan GCG berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan yang ditunjukkan dengan *market to book value* pada kuartal I, namun tidak berpengaruh pada *market to book value* pada kuartal II. Sedangkan penelitian Isgiyarta dan Tristina (2005) menemukan bahwa penerapan prinsip *corporate governance* mempengaruhi abnormal return saham perusahaan.

Penelitian lain yang merumuskan tentang hubungan antara penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Che Hat, et al. (2008). Dalam penelitian tersebut, Che Hat, et al. (2008) menggunakan variabel *timelines* (ketepatanwaktuan) dan *disclosure* (pengungkapan) hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara penerapan *good corporate governance* dengan *timelines* dan *disclosure*. Selain itu penelitian ini menemukan pula bahwa *timelines* dan *disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan *good corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran perusahaan juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi tolok ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa hal, antara lain: total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata asset dimana mempengaruhi kinerja tapi tidak secara langsung (Ferri dan Jones, 1979) dalam Riyanto (2011). Selain hal tersebut ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa secara umum perusahaan yang mempunyai total asset yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang total asset rendah. Oleh karena itu perusahaan dengan total asset besar lebih mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi

(Arryayani, 2003). Dalam pengertian bahwa perusahaan yang memiliki peralatan modern, fasilitas bagus serta sarana memadai akan lebih tinggi kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan kecil atau dengan kata lain mempunyai asset kecil. Sedangkan Herni, et al. (2008) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak ada pengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan, dengan meingkatkan ukuran perusahaan tidak secara langsung meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas tentang mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan, terlihat hasil yang cukup beragam. Akan tetapi, hasil yang beragam tersebut juga dipengaruhi perbedaan variabel yang digunakan oleh masing-masing peneliti untuk merefleksikan beragamnya indikator mekanisme *corporate governance* disebabkan luasnya definisi mekanisme *corporate governance* tersebut. Mengingat bahwa dalam penelitian sebelumnya belum ada batasan mengenai apa saja variabel yang termasuk struktur, sistem dan proses baik internal maupun eksternal. Maka penelitian ini berusaha untuk melakukan penelitian yang berfokus pada struktur internal perusahaan. Struktur internal perusahaan terdiri dari komposisi struktur internal perusahaan ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, berbicara mengenai kinerja perusahaan yang dihitung dengan rasio keuangan, tidak akan dapat dipisahkan dari ukuran perusahaan, memungkinkan kinerja keuangan yang terjadi dalam operasional suatu perusahaan semakin besar pula. Keuntungan, kerugian dan biaya yang dapat ditekan mungkin saja berbeda dengan perusahaan dengan aset yang lebih kecil. Penelitian ini menguji variabel *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*.

1.2 Rumusan Masalah

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Batasan masalah

1. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas yang di proyeksikan dengan ROA.
2. Dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan.
3. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada didalam perusahaan.
4. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset.
5. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
6. Data yang digunakan adalah data berturut-turut dari tahun 2016-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui hubungan mekanisme *Corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan menggunakan *Return On Assets* yang terbagi atas tiga (3) variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *Corporate Governance* terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi industri perbankan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan *Corporate Governnace* di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematik penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan bagian dasar acuan teori bagi penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian, dan perumusan hipotesis yang merumuskan asumsi hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB VI : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang isi pokok dari keseluruhan penelitian, yang mana menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.